

**POLA PENDIDIKAN POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MENJELANG PEMILU 2024
(Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

Muhammad Mu'arif Sidiq

1846021011



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

POLA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN MENJELANG PEMILU 2024 (Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)

Oleh

Muhammad Mu'arif Sidiq

Penelitian ini berangkat dari masih rendahnya partisipasi pemilih di Provinsi Lampung. Data terakhir pada Pilkada tahun 2020 mencapai 71%, angka ini masih di bawah target partisipasi nasional sebesar 77,5%. Data tersebut mengindikasikan bahwa target partisipasi pemilih belum terpenuhi. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, pendidikan politik merupakan tugas utama partai politik, meskipun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah sebesar 56,6%. PKS merupakan salah satu partai yang dinilai konsisten dalam menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik adalah PKS. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan menjelang pemilu 2024 yang dikembangkan oleh PKS merujuk pada konsep pendidikan politik yang dikembangkan oleh Paulo Freire, meliputi indikator; (1) kesadaran kritis, (2) partisipasi aktif, dan (3) penguasaan pengetahuan serta keterampilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara dan dokumen pada pengkaderan PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendidikan politik PKS ditekankan pada ; (1) Pemberdayaan masyarakat untuk tingkatkan kesadaran dan partisipasi politik; (2) Program Peningkatan Wawasan (PPW) melalui pertemuan langsung dan online dengan beragam tema; (3) Partisipasi aktif lewat kegiatan reses untuk komunikasi langsung dengan masyarakat. Dimasa yang akan datang seluruh partai politik melakukan rekrutmen secara regular, memperluas ruang partisipasi, meningkatkan kualitas pendidikan politik, dan keterlibatan partai dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi, Partai Politik, Pendidikan Politik Berkelanjutan.

ABSTRACT

SUSTAINABLE SOCIETAL POLITICAL EDUCATION PATTERN TOWARDS THE 2024 ELECTIONS

**(A Study at the Regional Board of the Prosperous Justice Party in Bandar
Lampung City)**

By

Muhammad Mu'arif Sidiq

This research departs from the low voter participation in the Province of Lampung. The latest data from the 2020 Regional Elections reached 71%, which is still below the national participation target of 77.5%. This data indicates that the voter participation target has not been met. In the effort to enhance voter participation, political education is a primary task of political parties, even though the public's trust in political parties is currently quite low, at 56.6%. The Prosperous Justice Party (PKS) is one of the parties that is considered consistent in conducting cadre training and political education. This study aims to understand the sustainable societal political education pattern towards the 2024 elections developed by PKS, referring to the concept of political education developed by Paulo Freire, which includes indicators: (1) critical awareness, (2) active participation, and (3) mastery of knowledge and skills. The research method used is qualitative descriptive with interview and document approaches in the PKS cadre training. The research results show that PKS's political education pattern emphasizes: (1) Empowering society to increase political awareness and participation; (2) Enhancement of Insight Program (EIP) through direct and online meetings with various themes; (3) Active participation through recess activities for direct communication with the community. In the future, all political parties will conduct regular recruitment, expand the space for participation, enhance the quality of political education, and involve parties in community empowerment.

Keywords: Participation, Political Parties, Sustainable Political Education.

**POLA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT SECARA
BERKELANJUTAN MENJELANG PEMILU 2024
(Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Oleh :

Muhammad Mu'arif Sidiq

1846021011



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : POLA PENDIDIKAN POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MENJELANG PEMILU 2024
(Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota
Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Muhammad Mu'arif Sidiq

Nomor Pokok Mahasiswa : 1846021011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Bendi Juantara, S.I.P., M.A.

NIP. 198809232010031011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

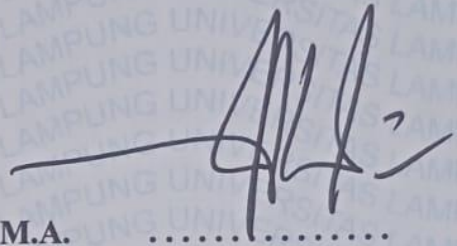
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 196112181989021001

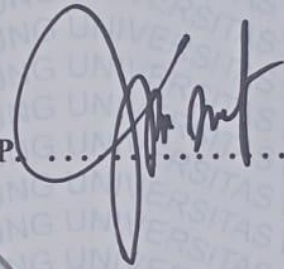
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Bendi Juantara, S.I.P., M.A.**



Penguji : **Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 196108071987032001



Tanggal Ujian Skripsi : 14 September 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Mu'arif Sidiq
NPM. 1846021011

Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Muhammad Mu'arif Sidiq, dilahirkan di Banjit, 22 September 2000 yang merupakan putra tunggal dari pasangan Bapak Imroni dan Ibu Emiriati. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SDN 01 Rantau Temiang pada tahun 2006–2012. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan di SMPN 01 Banjit pada tahun 2012-2015 dan melanjutkan ke jenjang SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Paralel dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis.

Penulis mulanya bergabung dengan Organisasi Eksternal Kampus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung (HMI) pada tahun 2020 sebagai anggota biasa dan diteruskan menjadi Bendahara Umum (Bendum) pada tahun 2022-2023. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2021 di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya”

(Paulo Coelho)

“Qui Totum Vult Totum Verdit”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Imroni (Alm) dan Emiriati

Kalian yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pola Pendidikan Politik Masyarakat Secara Berkelanjutan Menjelang Pemilu 2024”** (Studi di DPD PKS Kota Bandar Lampung). Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Pola Pendidikan Politik Masyarakat Secara Berkelanjutan Menjelang Pemilu 2024”** (Studi di DPD PKS Kota Bandar Lampung). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengungkapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantara:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan,, terimakasih atas support dan bimbingannya yang telah diberikan selama Penulis menjadi mahasiswa di jurusan Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P., selaku Dosen Penguji Utama, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Bendi Jauntara, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, terimakasih atas masukan, kritik, dan saran sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas perhatian dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tua Penulis, Bapak Imroni dan Ibu Emiriati yang selalu mendoakan dan mengiringi setiap langkah penulis;
9. Kepada informan Peneliti, Suhendro Prihandono selaku Kabid BHKP DPD PKS Kota Bandar Lampung, terimakasih telah bersedia menjadi informan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
10. Kepada keluarga besar anak cucung Salim-Sulidup dan Juni-Siti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan *support* yang telah diberikan kepada penulis sehingga menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini;
11. Kepada teman – teman seperjuangan di HIMANTAU, Robi Apriadi Harahap, Nendi Aji Pangestu, A.H Bernando, Robby Putra Indarsyah, Haridotama, Redo Bakas Pratama, Frans Aris Munandar, Yoga Pangestu, Shendy Aulia, Bambang

Kurniawan, Nyoman Candra Irawan, Anjas Ramadhan, Helmi Ilham, Try Nadi Jaya, terimakasih telah menemani Penulis selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan;

12. Kepada teman – teman seperjuangan angkatan 2018 di HMI Komsariat Sosial Politik Unila, Arben Irawan S.B, Aldy Nadiantara, Rahmando, M. Kevin Sofyan, Al Fadilah Syahadi, Robi Apriadi Harahap, Nendi Aji Pangestu, Robby Putra Indarsyah, M. Irnanda, Destia Natalia Rahmi, Nurotul Azizah, Heza Mahendra, Gusrian Bakhtiar, Terimakasih dedikasi, kebersamaan dan pembelajarannya selama ini di Komisariat serta adik – adik seperjuangan angkatan 2019, angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022 HMI Komsariat Sosial Politik Unila Terimakasih atas kebersamaannya maupun dedikasi waktu, tenaga dan pikiran di Komisariat;
13. Kepada Abang – Abang dan Teman – Teman Seperjuangan Pria Punya Selera Chapter Kedamaian, Bang Tiyas Apriza, Bang Akbar Azis, Bang Harjuno Saputro, Ibor Apariadi Harahap, Nendi Aji Pangestu, Terimakasih atas pelajaran dan kebersamaannya selama ini, terimakasih atas pelajaran, bimbingan, dan support yang diberikan kepada penulis;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Terimakasih kepada diriku yang telah menyelesaikan perjalanan panjang perkuliahan dan terus berjuang, belajar dan berkembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan balasan atas segala jasa serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 15 September 2023

Muhammad Mu'arif Sidiq

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Penelitian Terdahulu | 9 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 11 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Pemilihan Umum | 12 |
| 2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum | 12 |
| 2.1.2 Hak Pilih..... | 13 |
| 2.1.3 Sistem Pemilu di Indonesia | 14 |
| 2.2 Partai Politik | 15 |
| 2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum..... | 15 |
| 2.2.2 Fungsi partai politik..... | 17 |
| 2.2.3 Macam-Macam Partai Politik..... | 20 |
| 2.2.4 Peran Partai Politik | 21 |
| 2.3 Pendidikan Politik Bekelanjutan..... | 22 |
| 2.3.1 Definisi pendidikan politik | 22 |
| 2.3.2 Tujuan Pendidikan Politik | 24 |
| 2.3.3 Bentuk Pendidikan Politik | 25 |
| 2.3.4 Hubungan Partai Politik dalam Pendidikan Politik | 26 |

| | |
|---|----|
| 2.3.5 Teori Pendidikan Politik | 29 |
| 2.4 Kerangka Pikir Penelitian | 32 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 36 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 36 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 37 |
| 3.4 Informasi Responden | 37 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian | 38 |
| 3.5.1 Jenis Data | 38 |
| 3.5.2 Sumber Data | 38 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.6.1 Observasi | 39 |
| 3.6.2 Wawancara | 39 |
| 3.6.3 Studi Pustaka | 39 |
| 3.6.4 Dokumentasi | 40 |
| 3.7 Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| 3.7.1 Triangulasi Sumber Data | 40 |
| 3.7.2 Triangulasi Teknik | 41 |
| 3.7.3 Triangulasi Waktu | 41 |
| IV. Gambaran Umum | |
| 4.1 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera | 42 |
| 4.1.1 Sejarah tentang Partai Keadilan Sejahtera | 44 |
| 4.2 Lambang dan Arti Partai Keadilan Sejahtera | 46 |
| 4.3 Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera | 46 |
| 4.4 Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera | 47 |
| V. Hasil dan Pembahasan | |
| 5.1 Hasil Penelitian | 49 |
| 5.1.1. Kesadaran Kritis | 49 |
| 5.1.2 Partisipasi Aktif | 54 |
| 5.1.3 Penguasaan Pengetahuan Dan Keterampilan | 59 |

| | |
|--|----|
| 5.2 Pembahasan..... | 64 |
| 5.2.1 Kesadaran Kritis..... | 65 |
| 5.2.2 Partisipasi Aktif..... | 67 |
| 5.2.3 Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan..... | 70 |
| VI. Kesimpulan dan Saran | |
| 6.1 Kesimpulan..... | 74 |
| 6.2 Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 1.1 Indeks Kerawanan Pemilu 2019 | 6 |
| 1.2 Penelitian Terdahulu | 11 |
| 4.1 Perolehan Suara PKS Pada Pemilu Tahun 2002-2019 | 44 |
| 6.1 Perolehan Suara PKS dan Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019 Dapil Kota Bandar Lampung | 57 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Grafik Prilaku Non Voting | 3 |
| 1.2 Indeks Mobilisasi Menggunakan Uang | 11 |
| 2.1 Kerangka Pikir | 44 |
| 6.1 Grafik Perolehan Suara PKS dan Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019 Dapil Kota Bandar Lampung | 57 |

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan partai politik di Indonesia menjadi warna dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan gambaran wajah percaturan politik nasional atau bisa dikatakan sebagai tolak ukur partisipasi politik masyarakat. Sebagai bentuk menuju perkembangan demokrasi, partai politik lahir dari berbagai aspirasi masyarakat yang berkeinginan bersatu dalam wadah kesatuan republik Indonesia.

Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai partai politik sesuai dengan ragam pendapat yang hidup (Pasaribu, 2017). Partai politik dapat berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara serta membina dan mempersiapkan anggotanya untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Selain hal tersebut, partai politik merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.

Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan politik. Partai politik sebagai pemain di barisan terdepan berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Sedangkan pendidikan politik disini bukan hanya dimaknai sebagai proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi warga/ masyarakat untuk menerima nilai, norma, maupun symbol yang dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter (Tarsidi, 2018). Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman

tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Fungsi Parpol sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik antara lain sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat. Banyak parpol di Indonesia membawa konsekuensi bahwa seharusnya masyarakat pemilih mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi. Namun demikian, sampai saat ini peran parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat masih belum terasa maksimal diterima, yang menjadi kelemahannya yaitu belum adanya pemberian reward and punishment bagi suatu parpol yang tidak memberikan pendidikan politik kepada warga Negara (Masriyani & Yanti, 2019).

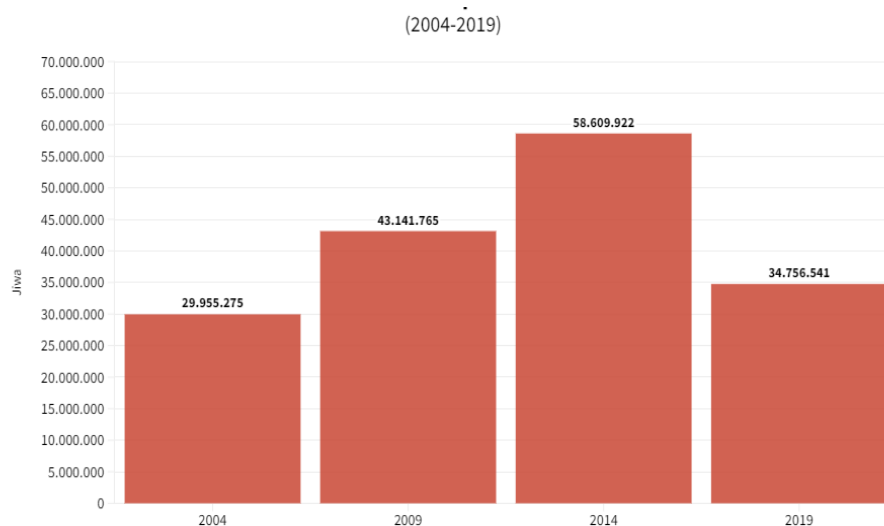
Fenomena yang ada dalam perkembangan kehidupan politik adalah, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, dan tidak mampu memahami kedudukan pribadinya serta peranan politiknya. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan obyek politik, dan dengan terpaksa harus bersedia menjadi obyek kepentingan negara serta disisi lainnya menjadi obyek kepentingan partai politik (Gesit Tri Susila, 2012).

Kurang terdidiknya warga negara secara politik, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elite politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka (Masriyani & Yanti, 2019). Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara.

Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan masyarakat dibidang politik dan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan (Kessek, 2019). Masyarakat sebagai warga negara masih banyak yang belum mengetahui dan paham apa saja hak dan kewajibannya dalam bidang politik sehingga mempengaruhi keikutsertaanya di bidang politik dan maraknya politik uang. Banyaknya faktor yang mempengaruhi tingginya fenomena dalam masyarakat tersebut tidak lepas dari peran penting partai politik

Pada era reformasi, Persentase perilaku non voting atau tidak memilih dalam pemilihan presiden pada 2019 menurun yakni 19,24 persen dari total PDT yakni 192,83 juta jiwa dibandingkan tahun 2014. Hal ini berdasarkan lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Sementara, perilaku non voting pada pileg 2019 justru lebih besar dibandingkan pilpres yakni 29,68 persen. Jumlah tersebut juga juga naik dibandingkan tahun 2014.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

(KPU) menyelenggarakan Pilkada serentak di 270 daerah. Rinciannya pemilihan gubernur di sembilan dari 34 provinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten, serta pemilihan wali kota di 37 dari 98 kota. Ada sekitar 100,3 juta

orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

Namun dari data sejumlah daerah memperlihatkan jumlah masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan, angka tersebut melebihi suara calon kepala daerah yang mendapat angka tertinggi. Tiga daerah yang mengalami perilaku non voting tinggi ialah Medan, Depok, Kediri, Tak sedikit orang yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Di Kota Medan, KPU telah menetapkan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachma sebagai pemenang Pilkada Medan 2020. Perilaku non voting lebih besar ketimbang perolehan suara pasangan tersebut. Hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan yakni Bobby-Aulia memperoleh 393.327 suara atau 53,45 persen dari suara sah. Sementara pasangan nomor urut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, hanya memperoleh 342.580 suara atau 46,55 persen. Total suara sah dalam Pilkada kali ini mencapai 735.907 suara, sedangkan yang tidak sah 12.915 suara. Dengan begitu, total 748.882 orang menggunakan hak pilihnya. Warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 886.964 orang atau 54,22 persen dari 1.635.846 total pemilih.

Berikutnya, Pilkada 2020 di Depok juga dimenangkan oleh perilaku non voting. Berdasarkan hasil penghitungan KPU Kota Depok, terdapat 451.625 orang yang tak menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, di Kabupaten Kediri yang merupakan satu dari 6 daerah yang telah 100 persen melakukan penghitungan suara oleh KPU dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur. Data yang dihimpun, total TPS di Kediri tercatat sebanyak 3.311 dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.231.512 warga. Dari total suara masuk yang diperoleh paslon nomor 01 Dhito-Dewi maupun kolom kosong hanya mencapai 608.460 suara. Padahal total DPT yang ditetapkan KPU dalam

pilkada tahun ini adalah 1.231.512 DPT yang berarti selisihnya sebanyak 623.052 DPT tidak memilih alias lebih dari separuh perilaku non voting.

Studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, survei yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan bahwa 42% masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Sedangkan 30% masyarakat menganggap prihatin dan 28% menganggap masalah besar. (Komite Independen Sadar Pemilu, 2019)

Sementara untuk di Provinsi Lampung Sebanyak 1.707.747 masyarakat Provinsi Lampung masuk ke dalam golongan putih (perilaku non voting) atau masyarakat Lampung yang tidak menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung pada 27 Juni 2018 lalu. Sesuai dengan berita acara nomor: 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018 rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi yang tertuang dalam formulir model DC1-KWK jumlah pemilih dari DPT, DPPH dan DPTb/KTP el/Surat Keterangan sebanyak 5.887.152 pemilih. Kemudian untuk jumlah suara sah di 15 kabupaten/kota yakni 4.099.272 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah ada 80.133 suara. Kemudian untuk total

surat suara sebanyak 4.179.405 suara Trenggono dalam (Lampung Post, 2018).

Pada pemilu tahun 2019 dan pilkada di tahun 2020. Dilihat dari data pemilu 2019, data pemilih 638.174. Dari jumlah tersebut, yang berpartisipasi ada 88 persen. Sedangkan yang tidak berpartisipasi atau perilaku non voting ada 12 persen. Sedangkan pada pilkada 2020, data pemilih ada 647 ribu. Ada kenaikan dibanding pemilu 2019. Tapi ada penurunan jumlah yang berpartisipasi, yakni hanya 69 persen (Kinanti dalam Tribun Lampung, 2022). Sukses atau tidaknya pendidikan politik kepada masyarakat dapat dilihat dengan tingkat partisipasi masyarakat ketika pemilihan umum, semakin sedikit masyarakat yang perilaku non voting maka semakin sukses partai politik dalam melakukan pendidikan partai politik kepada masyarakat. Hal ini mengingat pendidikan partai politik itu pada dasarnya adalah membentuk dan menumbuhkan orientasi politik individu (Rusadi, 2004).

| No | Indikator | Skor | kolerasi |
|----|---|-------|----------|
| 1 | Adanya kekerabatan politik/dinasti ditingkat Kab/Kota | 45,91 | 0,654 |
| 2 | Adanya tokoh/kelompok dominan (tokoh agama/etnis/) ditingkat Kab/Kota | 44,49 | 0,720 |
| 3 | Adanya tokoh/kelompok bisnis dominan ditingkat Kab/Kota | 49,97 | 0,665 |
| 4 | Adanya mobilisasi dengan menggunakan ancaman/intimidasi | 38,00 | 0,554 |
| 5 | Adanya mobilisasi dengan menggunakan politik uang | 46,30 | 0,694 |

Tabel 1.1 Indeks Kerawanan Pemilu 2019

(sumber data: Bawaslu)

Sementara itu, potensi Praktik Politik Uang dengan mendasarkan pada subdimensi Kampanye, Partisipasi Pemilih, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawasan Pemilu, dan Partisipasi Publik terdapat 177 kabupaten/kota (34,4 persen) dengan tingkat Kerawanan Tinggi dan 337 kabupaten/kota (65,6 persen) dengan tingkat Kerawanan Sedang.

Kejaksanaan Negeri Bandar Lampung memberikan pemahaman *money politic* atau *politik uang* terhadap partai politik di Bandar Lampung dan verifikator partai dari KPU Bandar Lampung. Kejari Bandar Lampung Helmi mengatakan politik uang masih menjadi tren pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya dengan adanya politik uang dapat memperlemah sistem ketatanegaraan yang demokratis, tidak terwujudnya pemilu yang adil, dan berintegritas serta tidak terwujudnya Pemilu yang efektif dan efisien.



**Gambar 1.2 index mobilisasi dengan menggunakan politik uang
(sumber data: Bawaslu)**

Eef Saifulloh Fatah berpendapat bahwa “prilaku non voting” tidaklah mewakili sebuah kalangan atau kelompok politik homogen, dalam konteks memilih sebagai hak, prilaku non voting mewakili sebuah spektrum luas dan

beragam, dalam menjawab tentang Fenomena perilaku non voting Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (2010:68-69) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku non voting, antara lain:

- 1) Faktor teknis, tidak memilih karena situasi dan kondisi yang mendesak seperti adanya keluarga wafat, ketiduran, kelelahan, sakit, karena harus bekerja, dan lain-lainnya.
- 2) Faktor teknis politis, seperti tidak mendapat undangan karena tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- 3) Faktor politis, yaitu adanya perasaan dari mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat atau partai yang tersedia, mereka tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.
- 4) Faktor ideologis, masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, juga pada lembaga pemerintah selaku penyelenggara, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya. (Purba, 2017)

Adapun mengenai maraknya politik uang ini bisa terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai politik dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Selain itu, meski mengetahui dan melihat bagaimana politik uang ini terjadi, hanya sebagian kecil masyarakat yang mau membuat aduan akan pelanggaran tersebut, atau bahkan ada yang sama sekali tak tahu cara untuk membuat aduan ketika terjadi politik uang di sekitarnya.

Peneliti melihat bahwa pola pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan menjelang pemilu di tahun 2024 mendatang. Dalam hal ini peneliti mengkaji partai PKS dengan dasar bahwa partai PKS merupakan partai yang *relative* konsisten dalam menerapkan kaderisasi. Bersumber lampung antara news tercatat ditahun 2015 PKS Lampung berhasil menambah kader binaan sebanyak 5.898 kader. Berdasarkan pendataan pada maret 2015, kini tercatat total 23.837 kader yang dibina oleh PKS Lampung.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sejauh mana implementasi fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat umum. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Pendidikan Politik Masyarakat Secara Berkelanjutan menjelang Pemilu 2024 (Studi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebagai bahan acuan dalam menentukan langkah sebagai pertimbangan penelitian ini. Ada beberapa pustaka yang peneliti temukan yang dapat dijadikan sebagai instrument pembanding dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut

| No | Peneliti/Tahun | Judul Penelitian | Hasil Pembahasan |
|----|--------------------------|---|---|
| 1 | Afen Sandika (2018) | Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dikatakan bahwa peran PDI Perjuangan Mesuji telah memainkan perannya sebagai partai politik komunitas. Bentuk pendidikan politik PDI-P di daerah Mesuji meliputi: pelatihan kepemimpinan, dialog publik, debat terbuka, gerakan dialog, kelompok pengasuhan atau Aliansi dll. Pemantauan, evaluasi dan agitasi strategi pendidikan politik PDI-P, promosi dan stimulasi. |
| 2 | Dian Nugraheni (2017) | Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai | Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tegal. | Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tegal bersifat formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal ditujukan untuk internal partai, yaitu: anggota, kader, pengurus, dan petugas partai. Sedangkan pendidikan politik yang bersifat informal dilaksanakan dengan internal partai untuk masyarakat umum. |
| 3 | Lutter Ariestino dan Sri Kusriyah (2017) | Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilu Di Kota Semarang. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Demokrat, partai Golkar, dan partai Gerindra kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum telah mengalami peningkatan atau keberhasilan dari tahun ke tahun dengan menggunakan cara mereka masing-masing dalam memberikan pendidikan politik. |
| 4 | Ika Setiati Budi Utami (2019) | Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Di Tinjau Undang-Undang | Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan politik yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI Perjuangan hamper sama berfokus pada pendidikan para kader, perbedaannya PPP memfokuskan sosialisasi terkait |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang) | politik uang pada masyarakat. PDI Perjuangan Kota Malang dalam Konsep Hasan Al-Banna hanya memenuhi satu aspek yaitu munculnya partisipasi politik (<i>musyarokah siyasiyah</i>) sedangkan PPP blum memenuhi satupun aspek Hasan Al-Banna. |
|--|--|---|--|

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu

1.3 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar mencapai sasaran. Adapun masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Pola Pendidikan Politik Masyarakat Secara Berkelanjutan Menjelang Pemilu 2024?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Pola Pendidikan Politik Masyarakat Secara Berkelanjutan Menjelang Pemilu 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pihak akademisi sebagai sumber bacaan serta untuk menambah wawasan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa atau peneliti di dalam meneliti masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, bagi pemerintah, pengurus partai politik, dan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat luas sebagai bahan dalam menjawab permasalahan mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

2.1.2 Hak Pilih

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.²

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a) Tidak terganggu jiwa/ ingatannya
- b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.

- b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2.1.3 Sistem Pemilu di Indonesia

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa, tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945. Menurut Joeniarto dalam bukunya Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, sitem pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan menjadi dua acara, yaitu : 1. Pemilihan langsung. 2. Pemilihan tidak langsung atau bertingkat.

Selain sitem yang disebutkan oleh Joeniarto dalam bukunya Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Lijphart membedakan lagi beberapa system Pemilu antara lain¹¹ :

1. System Proportional Representative, yaitu dimana proposisi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut.
2. Sistem The Singel Transferable Vote, Pemilih diminta untuk memberikan prefensinya kepada beberapa calon yang diajukan dalam wilayahnya, begitu pemilihan selesai, maka penghitungan kuota dilakukan guna menentukan berapa jumlah suara yang dibutuhkan oleh calon untuk mendapatkan kursi.
3. Sistem Distrik atau Plurality System, wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan biasanya atas dasar jumlah penduduk, tetapi tentu saja ada variasinya seperti mendasarkan pada daerah administrasi.

2.2 Partai Politik

2.2.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Dari pengertian diatas bahwa partai politik itu memiliki orientasi untuk memperoleh kekuasaan, tetapi partai politik juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan konstituen partai yang notabene adalah landasan besar bagi suatu parpol. Untuk itu partai harus secara kontinyu melaksanakan fungsi-fungsinya dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” .

Kehadiran partai politik tidak dapat diterima secara serta merta terutama pada abad ke-18, namun dapat diterima melalui proses yang panjang. Partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam suatu sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebenarnya menentukan demokrasi suatu negara. Karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat

pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis. (Asshidiqqie, Jimly: 2005)

Mengenai perlu atau tidaknya partai politik di dalam suatu negara, ada dua perbedaan kelompok pendapat; pertama, M. Ostrogrosky, James Bryce, Robert Crowley, dan Puffet tidak setuju pada adanya partai politik. Dengan salah satu alasannya yaitu partai politik bersifat hierarkis, serta dalam melakukan ideologi politiknya memerlukan dana yang biasanya diperoleh dari donatur sebagai imbalan partai memberikan janji-janji tertentu. Kedua, Woodrow Wilson (mantan Presiden Amerika Serikat), A.D. Lindsay, R.M. Mac Iver, Joseph Schumpeter, dan Maurice Duvergeer menilai eksistensi partai politik sangat diperlukan. Dengan salah satu alasannya bahwa partai politik dapat memperjuangkan kepentingan umum. Kesimpulannya, dalam negara modern partai politik dipandang sebagai salah satu pilar demokrasi dalam rangka pemilihan umum, maka eksistensi partai politik dipandang suatu keniscayaan yang diperlukan dalam suatu negara

Dalam Buku Pengantar Sosial Politik (2011) Sigmund Neumann menyatakan, partai politik adalah sebuah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Mereka adalah sebuah kelompok yang memusatkan perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan politik dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Tentu saja partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai

politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi non-partai politik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan organisasi non-pemerintah.

2.2.2 Fungsi partai politik

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam memuaskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tak dapat dipisahkan (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik) yaitu memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan warga negara juga berhak menerima pendidikan tersebut. Misalnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat, disini partai politik memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, maka masyarakat mulai memahami apa itu politik dan pendidikan politik. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat

memberikan partisipasi yang tepat bagi negaranya, seperti berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum (Masriyani dan Yanti, 2019).

Miriam Budiardjo (2004: 163 – 164) menyebutkan ada 4 fungsi partai politik dalam negara yang demokratis, yaitu:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi Negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949, terbentuknya negara-negara boneka yang bernuansa kedaerahan. Negara-negara boneka ini sengaja diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Namun kenapa hal itu terjadi dan ditangkap oleh sebagian rakyat pada waktu itu karena aspirasi rakyat berbelok arah mengikuti aspirasi penjajah, karena tersumbatnya saluran aspirasi yang disebabkan kapasitas sistem politik

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah Masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk

memunculkan masyarakat madani (*civil society*). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik

belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Secara umum kita sering beranggapan bahwa konflik mengandung benih dan didasarkan pada pertentangan yang bersifat kasar dan keras. Namun sesungguhnya, dasar dari konflik adalah berbeda-beda, yang secara sederhana dapat dikenali tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik yaitu: (1) Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu konflik; (2) Unit-unit tersebut, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhankebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasanggagasan; dan (3) Terjadi atau terdapat interaksi antara unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam sebuah konflik.

Konflik merupakan suatu tingkah laku yang tidak selalu sama atau identic dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dan atau dikaitkan dengannya, seperti rasa kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada lingkungan yang luas yaitu masyarakat. Pada taraf masyarakat, konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai-nilai dan norma-norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma di mana kelompok tersebut berada. Demikian pula konflik dan bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat yang disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman hidup dan sumber-sumber sosial ekonomis di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain.

2.2.3 Macam-Macam Partai Politik

Partai politik juga telah terdiferensiasi berdasarkan tipologinya atau klasifikasinya. Klasifikasi itu dapat diketahui dari tiga dasar kriteria, yaitu asas dan orientasinya, komposisi dan fungsi, serta basis tujuan dan sosial. Dari sisi asas dan orientasi, parpol dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Parpol Pragmatis, yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku dari suatu doktrin dan ideologi tertentu.
2. Parpol doktriner, adalah suatu parpol yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya.
3. Parpol kepentingan, merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dikelola atas dan dasar kepentingan tertentu, seperti buruh, etnis, agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

2.2.4 Peran Partai Politik

Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditunjukkan oleh para elite politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik. Lebih parahnya lagi apabila di Indonesia tidak ada satu pun yang dapat dijadikan panutan, sehingga masyarakat awam, pinggiran dan desa selalu menanti datangnya “ratu adil” atau “satria piningit”, seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arianto, 2004: 84-86).

Partai-partai politik dalam masa transisi ini seharusnya mengisi ruang publik dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional. Bermacam-macam Partai Politik dengan bermacam-macam azas tentunya akan sangat mempengaruhi sistem demokrasi dan pendidikan demokrasi rakyat. Sebagai contoh, bila Partai Politik yang berazaskan agama Islam yang memenangi Pemilihan Umum, tentunya akan merubah sistem demokrasi, dari Demokrasi Pancasila ke demokrasi yang sesuai dengan Syariat agama Islam (Arianto, 2004: 84-86).

2.3 Pendidikan Politik Bekelanjutan

2.3.1 Definisi pendidikan politik

Pendidikan politik mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan apapun jenisnya, tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Pendidikan politik tersebut menurut Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan negara bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara, memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai religius, sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai (Soemarno, 2002). Pendidikan politik ialah suatu proses mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing yang sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan (Labolo, 2015).

Gabriel Almond menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk membentuk nilai politik masyarakat agar mereka berpartisipasi politik di dalamnya. M. Nur Khoiron menjelaskan pendidikan politik sebagai *political forming* dan *political bildung* (Daffa, Muhammad daud, 2019).

Makna forming sendiri, pendidikan politik terdapat kandungan berisi intensitas dalam pembentukan insan politik yang sadar atas status politiknya di dalam kedudukannya sebagai warga negara yang baik. Bildung mempunyai makna, pendidikan politik merupakan pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran tanggung jawab menjadi insan politik (Handoyo & Lestari, 2017).

Giesecke menjelaskan konsep pendidikan politik sebagai *verhaltungswissen*, seseorang dapat memahami hukum, tata tertib dan peraturan tingkah laku politik, sehingga subjek menjadi lebih cermat dan bijaksana menanggapi situasi dan kondisi politik sesaat.

Terakhir, Giesecke menjelaskan pendidikan politik sebagai *aktionwissen* yaitu seseorang dapat bertingkah laku tepat, cermat dan benar karena didukung oleh prinsip keadilan dan seseorang mampu mempunyai wawasan kritis (Daffa, Muhammad Daud, 2019).

Dalam definisi yang lain, Dudih Sutrisman menjelaskan pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan seseorang atau lebih serta, dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai Pancasila (Daffa, 2019)

Dari penjelasan diatas mampu disimpulkan, pendidikan politik yaitu proses pengajaran dan memberikan pemahaman mengenai kewajiban serta hak sebagai warga negara pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam bidang politik sebagai warga negara. Serta tetap menjunjung tinggi akan sebuah nilai-nilai dari demokrasi pancasila.

2.3.2 Tujuan Pendidikan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik, dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Kartono (2009), melalui pendidikan politik diharapkan dapat membina karakteristik kepribadian Indonesia, yaitu berupa tindakan sebagai berikut:

1. Sadar akan hak, kewajiban, tanggung jawab etis/moril dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan keteladanan yang baik.
2. Dengan sadar menaati hukum dan UUD 1945, memiliki disiplin pribadi, disiplin sosial dan nasional, nasionalisme yang teguh dan tidak sempit atau chauvinistic.
3. Berpandangan jauh ke depan (futuristik), dengan tekad perjuangan mencapai taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkeesejahteraan, didasarkan pada kemampuan obyektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia sendiri.
4. Aktif berpartisipasi, dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik.
5. Secara kesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran adanya keanekaragaman/pluriformitas suku-suku bangsa dan agama, serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.
6. Sadar akan perlunya memelihara lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitar agar lestari laras danimbang (terjamin ekosistemnya) sebagai wadah kehidupan yang sehat.

Menurut Affandi (1996), Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah untuk memberikan pembinaan kepada generasi muda Indonesia dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan politik membantu menemukan isi, arah, dan pemahaman tentang proses apresiasi yang sedang berlangsung. Artinya, pendidikan kewarganegaraan menekankan pada upaya memahami nilai-nilai etika normatif. Artinya, mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar bagi kemajuan dan pembangunan untuk berperan serta dalam kehidupan bangsa.

Brownhill (1989:4), pendidikan politik adalah tinjauan terbatas dan berkelanjutan mengenai institusi dan kehidupan sehari-hari serta pendekatan pada moral. Gambaran umum mengenai pendidikan politik yang dapat dicapai, berikut merupakan tahapan-tahapannya:

- 1) Tahapan pertama sering dinamakan cognitive morality merupakan tahapan yang paling rendah atau dengan kata lain mudah dicapai, memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran politik.
- 2) Tahap kedua atau tahapan terakhir terkait dengan masalah sikap (afektif), yang berhubungan dengan tindakan atau masalah perilaku setelah orang tersebut mendapatkan pendidikan politik.

Inti dari tujuan utama dari pendidikan politik yaitu, pendidikan politik ingin menunjukkan bahwa politik dan juga isu-isunya bukan hanya sebuah pembelajaran bagi para elit politik atau mereka yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Politik merupakan salah satu wadah pembelajaran bagi warga negara, sehingga dengan adanya pendidikan politik warga negara dapat melakukan aktivitas politik secara benar sesuai dengan asas negara tersebut.

2.3.3 Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya

akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksanannya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu Negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah Negara.

Pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja. Namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel. Semua bentuk pendidikan politik sebenarnya tidak jadi persoalan, artinya semuanya baik asalkan mampu memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik tersebut dapat merubah individu yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya atau memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa Negara.

Menurut Kartaprawira (2004), terdapat beberapa bentuk penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal (sekolah) ataupun informal.

2.3.4 Hubungan Partai Politik dalam Pendidikan Politik

Partai politik adalah salah satu pendukung dari suksesnya negara demokrasi. Partai politik akan mampu menjalankan perannya dengan efektif apabila ada tanggung jawab bersama antara partai politik itu sendiri dengan masyarakat luas. Untuk itu maka partai politik

seharusnya mampu menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Partai politik adalah sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan menyalurkan aspirasi yang dimiliki untuk proses pembangunan negara yang berkeadilan dan makmur. Sistem politik Indonesia beberapa dekade terakhir telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar pendukung demokrasi yang nyata.

Pendidikan politik adalah proses memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik negara dan akhirnya terimplementasi pada kegiatan pemilihan umum. Sukses atau tidaknya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat dapat dilihat dengan tingkat partisipasi masyarakat ketika pemilihan umum, semakin sedikit masyarakat yang Prilaku non voting maka semakin sukses partai politik dalam melakukan pendidikan partai politik kepada masyarakat. Hal ini mengingat pendidikan partai politik itu pada dasarnya adalah membentuk dan menumbuhkan orientasi politik individu (Rusadi, 2004).

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

Pendidikan partai politu bertujuan untuk: Pertama, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional. Dimana pendidikan politik dilakukan untuk membangun budaya etis dan politik yang sesuai dengan Pancasila.

Selanjutnya Pasal 34 ayat (3a) menjelaskan bahwa: dalam pelaksanaan pendidikan politik, partai politik menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional

kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang perhitungannya didasarkan pada jumlah suara akuisisi. Bantuan keuangan diprioritaskan untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan partai politik harus dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat mengingat bahwa banyak masyarakat yang masih awam mengenal politik.

Bukan karena apa, hal ini terjadi karena kurang paham dan sadarnya masyarakat akan politik itu sendiri. Politik sebenarnya tidaklah seram dan kegiatan yang saling menjatuhkan. Justru dengan keberadaan politik yang sebenarnya mampu menjadikan keadaan menjadi stabil baik itu dari sisi keamanan ataupun pertahanan negara. Politik apabila digunakan dengan baik maka akan memberikan dampak yang positif pula bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi keberadaan paradigma di masyarakat menjadikan politik dianggap sebagai sesuatu yang menyeramkan dan jarang ada yang mau mengerti dan memahami politik itu sendiri. Berjalannya suatu negara tidak akan bisa mencapai kondisi yang kondusif apabila tidak berjalan beriringan dengan politik.

Hal ini karena politik adalah salah satu stabiliser yang menjalankan fungsinya dalam menopang pembangunan ekonomi di suatu daerah. Untuk itu maka sudah seharusnya masyarakat paham dan mengerti dengan dunia politik sehingga politik yang ada akan menjadi politik yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakatnya dalam pengambilan keputusan. Adapun fungsi dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dilakukan oleh Partai Politik. Pendidikan politik akan sukses apabila seberapa besar masyarakat di daerah tersebut mampu untuk berpartisipasi dalam politik dan dalam pengambilan keputusan. Keikutsertaan masyarakat dalam politik, riilnya dapat dilihat pada saat pemilihan umum secara langsung, baik itu dalam pemilihan umum. Semakin tinggi angka partisipasi dan semakin rendahnya angka perilaku non voting dalam kegiatan tersebut maka

menunjukkan bahwa partai politik berhasil dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (Kusuma dkk, 2020).

2.3.5 Teori Pendidikan Politik

Teori pendidikan politik berkelanjutan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang membentuk landasan dalam pengembangan pendidikan politik berkelanjutan. Beberapa teori yang berkaitan dengan pendidikan politik berkelanjutan antara lain:

1. **Teori Kritis:** Teori ini menekankan pada pentingnya pendidikan kritis dan transformasional yang menghasilkan warga negara yang kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan hidup. Teori Kritis juga menekankan pentingnya partisipasi politik yang aktif dan mengkritisi kebijakan publik yang tidak berkelanjutan.

David Selby dan Fumiyo Kagawa (2012) dua ahli pendidikan berkelanjutan yang mengembangkan teori pendidikan berkelanjutan yang menekankan pada pentingnya pemahaman kritis tentang isu-isu sosial dan lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam teori mereka, pendidikan politik berkelanjutan harus membantu peserta didik memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan publik yang tidak berkelanjutan. Secara keseluruhan, Teori Kritis dalam pendidikan politik berkelanjutan memiliki kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pengembangan warga negara yang kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan

2. **Teori Humanisme:** Teori ini menganggap pendidikan politik berkelanjutan sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menciptakan warga negara yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial.

Martha Nussbaum (2000) Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan kapabilitas manusia sebagai tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan. Nussbaum mengemukakan bahwa pendidikan politik berkelanjutan harus mendorong pengembangan kapabilitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebebasan.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan: Teori ini menekankan pentingnya pendidikan politik dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan politik berkelanjutan dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Sachs, pembangunan berkelanjutan harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya. Dimensi sosial mencakup akses universal terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, serta pengurangan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dimensi lingkungan mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Sachs juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam hal pengambilan keputusan yang berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

4. Teori Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan: Teori ini menekankan pada pentingnya pendidikan politik dalam pengembangan masyarakat berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan politik berkelanjutan dianggap sebagai sarana untuk membangun partisipasi masyarakat yang

lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Robert Chambers, pengembangan masyarakat yang berkelanjutan harus dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Chambers menekankan pentingnya melihat masyarakat sebagai sumber daya dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, bukan sebagai objek atau penerima program.

Chambers juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas masyarakat dalam hal pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses terhadap informasi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan mereka.

Selain itu, Chambers menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Secara keseluruhan dalam pengembangan pendidikan politik berkelanjutan, berbagai teori tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang program dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan politik berkelanjutan harus mengintegrasikan nilai-nilai berkelanjutan, yaitu nilai-nilai lingkungan, ekonomi, dan sosial yang berkesinambungan.

Menurut Freire, pendidikan politik harus menjadi alat pembebasan yang memungkinkan masyarakat untuk mengenali dan mengatasi ketidakadilan sosial dan politik yang ada dalam struktur kekuasaan. Pendidikan politik yang memberdayakan masyarakat harus melibatkan

mereka dalam proses pembelajaran yang kolaboratif dan dialogis, di mana pengetahuan dan pengalaman mereka dihargai dan diberdayakan.

Indikator-indikator pemberdayaan pendidikan politik masyarakat berkelanjutan menurut Paulo Freire dapat mencakup:

Kesadaran kritis: Masyarakat memiliki kesadaran yang kritis terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka mampu mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Partisipasi aktif: Masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Mereka memiliki akses dan kemampuan untuk berkontribusi dalam membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Penguasaan pengetahuan dan keterampilan: Masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik. Mereka memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, Teori Pemberdayaan dalam pendidikan politik masyarakat menurut Paulo Freire menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat melalui pendidikan pembebasan. Indikator-indikator pemberdayaan pendidikan politik masyarakat berkelanjutan mencakup kesadaran kritis, partisipasi aktif, penguasaan pengetahuan dan keterampilan.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 disebutkan bahwa fungsi partai politik diantaranya adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kenyataan yang terjadi pada saat ini pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat kurang. Pendidikan politik yang dilakukan hanya pada masa kampanye menjelang pemilu, yaitu pendidikan pemilih dalam hal pemilu dan visi misi parpol, hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan diarahkan untuk memilih partai tersebut. Kemudian peran parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat masih belum terasa maksimal diterima, yang menjadi kelemahannya yaitu belum adanya pemberian reward and punishment bagi suatu parpol yang tidak memberikan pendidikan politik kepada warga Negara. (Masriyani & Yanti, 2019). Dengan dibuktikan pada pemilu tahun 2019 dan pilkada di tahun 2020 di Provinsi Lampung. Dilihat dari data pemilu 2019, data pemilih 638.174. Dari jumlah tersebut, yang berpartisipasi ada 88 persen. Sedangkan yang tidak berpartisipasi atau perilaku non voting ada 12 persen. Sedangkan pada pilkada 2020, data pemilih ada 647 ribu. Ada kenaikan dibanding pemilu 2019. Tapi ada penurunan jumlah yang berpartisipasi, yakni hanya 69 persen. (Kinanti dalam Tribun Lampung, 2022)

Masalah di atas sangat menarik untuk diteliti pengimplementasian fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat. Partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik. Hal ini tidak akan pernah teratasi jika model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya

kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti

III. METODE PENELITIAN

1.1 Rancangan Penelitian

Desain penelitian dirumuskan dengan tujuan untuk memperjelas arah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian dan pemecahan masalah juga bekerja dengan baik ketika tujuan penelitian jelas dan terdefinisi dengan baik. Dilihat dari metodenya sendiri, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara pandangan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2013).

Penelitian deskriptif menurut Moleong (2012) meliputi : penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu, penggunaan fasilitas masyarakat, memperkirakan proposisi yang mempunyai pendapat, sikap dan tingkah laku tertentu, berusaha melakukan suatu ramalan, serta mencari suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini ialah karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta dan di gambarkan oleh kata kata yang di peroleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Peneliti bermaksud menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi serta di peroleh di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati berkaitan dengan pengimplentasian fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang

tidak relevan (Moleong, 2012). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang dipakai. Fokus dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pola pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan menjelang pemilu 2024 melalui indikator teori yang dikemukakan oleh Paulo Freire, yaitu; 1. Kesadaran kritis, 2. Partisipasi Aktif, 3. Penguasaan Keterampilan dan Pengetahuan sehingga menjadikan pendidikan yang ada dimasyarakat menjadi berkelanjutan.

1.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi ini adalah dengan mempertimbangkan teori dan dengan mempelajari serta mendalami fokus rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian yang akan di teliti adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang objektif dan masuk akal.

1.4 Informan/Responden

Informan Kunci adalah orang yang memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Seorang informan yang baik adalah informan yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk berwawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (Key Informan) didapatkan dalam situasi yang sesuai dengan focus penelitian. Adapun dalam penentuan informan menurut (Fuad & Nugroho 2012) ada dua teknik Purposive sampling (sampel bertujuan) dan teknik Snowball sampling (sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar). Purposive sampling yaitu informan-informan yang meneliti tentukan merupakan orang-orang yang

menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Sedangkan Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Akan berhenti mencari sumber data apabila sudah mencapai titik jenuh, artinya sudah tidak variasi jawaban dari informan.

1.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian

1.5.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian

1.5.2 Sumber Data

Data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam dengan informan yang dianggap berkompeten dibidangnya. Data yang digunakan adalah subjek yang berasal dari wawancara dengan informan dan data dokumenter. Sedangkan data sekunder berupa data pendukung untuk diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu, informan tersebut di atas dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.

1.6 Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Observasi

Observasi (observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Disini, Peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung.

1.6.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut atau ingin belajar lebih banyak dari responden. Untuk wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dianggap mampu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan oleh orang bebas. Ini adalah kombinasi dari teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam hal ini, peneliti pertama kali mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur, kemudian memperdalam pertanyaan secara berurutan dengan mengekstrak lebih banyak informasi. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan dan menjawab pertanyaan terbuka serta memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terperinci. Wawancara dilakukan secara terbuka dan subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara tersebut.

1.6.3 Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

1.6.4 Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama dalam penelitian.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian harus diteliti keabsahannya sehingga dapat dikatakan valid atau mengungkapkan kebenaran yang objektif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Menguji data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki hubungan yang jelas yakni dengan melakukan pengecekan atau menggolonggolongkan hal yang mampu dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan tiga uji antara lain :

1.7.1 Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran atas informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara, observasi maupun survei, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masingmasing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Penulis melakukan pengecekan dengan cara melakukan wawancara selain dari pengurus partai yaitu informan yang dianggap lebih

berkompeten dan 34 menjawab pertanyaan wawancara sesuai dengan realita yang ada sebagai komparasi dan penguat data wawancara

1.7.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Triangulasi teknik adalah usaha mengecek keabsahan data atau mencek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaan juga dengan cara cek dan recek (Maleong, 2012).

1.7.3 Triangulasi Waktu

Waktu Juga sering menjadi factor kredibelitas data. Maka dari itu dalam melakukan kredibelitas data dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini juga merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum.

Bahkan, menjalar pula ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya muncul dalam bentuk pemikiran keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktek-praktek pengamalan sehari-hari. Persaudaraan (ukhuwah) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik. Gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental, dan jaringan mereka pun semakin meluas. Mereka juga berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga pendidikan, meskipun saat itu berada dalam bayang-bayang kekuasaan orde baru yang demikian ketat mengawasi aktivitas keagamaan.

Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan yang semakin luas. Studi yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi bahwa

jamaah tarbiyah lahir pada masa-masa puncak otoriterisme rezim Soeharto. Ketika rezim memakai represi bahasa kekerasan, hingga acara administratif sebagai kontrol sosial terhadap mengatur gerakan Islam sehingga sukses menjinakan perlawanan terhadap negara dalam bentuk kalangan tarbiyah dengan melihat kembali fase-fase sebagai berikut: (1) gerakan yang berbasis di masjid kampus; (2) Lembaga Mujahid Dakwah (LMD) sebagai jejaring awal aktifis dakwah; (3) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) sebagai wadah gerakan; (4) penguasaan senat mahasiswa untuk mempelancar tercapainya tujuan organisasi dan melipat gandakan rekrutmen anggota; dan (5) pembentukan gerakan mahasiswa Islam antar-kampus, KAMMI 58 .

Perkembangan berikutnya musyawarah kemudian dilakukan oleh para aktivis dakwah islam, yang melahirkan kesimpulan perlunya iklim yang berkembang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraihian cita-cita mereka, yaitu apa yang mereka maksudkan sebagai upaya mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang diridhai Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cata demokratis yang bisa diterima banyak orang. maka mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah partai politik.

Sebelum PK didirikan, kader-kader tarbiyah bertanggung jawab secara langsung dalam proses-proses rekrutmen dan pelatihan kader. Sejak pembentukan PK, semua anggota Tarbiyah otomatis menjadi anggota PK; forum-forum diskusi keagamaan dan pelatihan kader diambil alih manajemen penyenggara oleh partai tersebut. 59 Partai Keadilan secara resmi berdiri pada 20 Juli 1998. Islam menjadi asas dari partai baru ini. Dalam pemilu 1999 Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi DPRD Tingkat I, 160 kursi DPRD Tingkat II dan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu 1999.

Namun hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan electoral threshold, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Pascapemilu 1999, Partai Keadilan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera dikarenakan untuk mengantisipasi terhadap berlakunya ketentuan electoral threshold. Kemudian didirikan pada 20 April 2002, sebuah partai baru akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

Selama 19 tahun berdiri, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh hasil yang naik-turun secara persentase. Dari empat Pemilu yang diselenggarakan, PKS selalu gagal menempati 3 besar dari keseluruhan partai politik di Indonesia dengan rincian perolehan suara seperti berikut

| Tahun | Perolehan Suara |
|--------------|------------------------|
| 2004 | 8.325.020 (7,34%) |
| 2009 | 8.204.946 (7,89%) |
| 2014 | 8.455.614 (6,77%) |
| 2019 | 11.493.663 (8,21%) |

Table 4.1 Perolehan suara PKS pada Pemilu dari tahun 2004-2019

Berdasarkan dari data diatas, perolehan suara PKS terendah berdasarkan jumlahnya dalam pemilu legislatif adalah pada tahun 2009 dan perolehan suara tertinggi pada pemilu tahun 2019 lalu.

4.1.1 Sejarah tentang Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan oleh di Jakarta pada hari Sabtu, 9 Jumadil Ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002 dengan akte notaries Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., nomor 2, tanggal 11 Juni 2002 dan telah didaftarkan pada Depkeham dengan nomor registrasi 2002-07-0199. PKS juga telah

didaftarkan ulang pada Depkeham dengan nomor registrasi daftar ulang: 002/DU-PARPOL/DITJENAHU/V/2003. Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan telah lolos verifikasi di tingkat pusat, artinya kepengurusan partai, personal partai, kesekretariatan partai, dan kelengkapan sekretariat telah memenuhi syarat verifikasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2, 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2002.

Partai Keadilan Sejahtera didirikan oleh kader Partai Keadilan dengan arahan dan dukungan penuh DPP Partai Keadilan dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya electoral treshold (ET) 2 % dalam Pemilu 2004. Karena Undang-undang Pemilu nomor 13/2003 memberlakukan ET 2 % tersebut, maka Partai Keadilan akan mengikuti Pemilu 2004 dengan wajah baru dengan nama Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini disimbolkan dengan dinyatakannya secara formal Penggabungan PK ke dalam PK Sejahtera pada saat Deklarasi Keberadaan PK Sejahtera di setiap jenjang struktur (dari DPP, DPW, DPD, DPC dan seterusnya).

Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera tingkat pusat dilakukan di Silang Monas, Jakarta, pada Ahad, 20 April 2003 (tepat 1 tahun setelah berdiri), dengan dihadiri oleh massa pendukungnya. Prosesi penggabungan secara resmi dilakukan pada Kamis 3 Juli 2003 di hadapan notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H.. Pada prosesi ini, selain dilakukan penandatanganan dokumen penggabungan, juga diserahkan seluruh aset milik PK di antaranya gedung, sarana kantor, lambang, dan berkas surat-menyurat. Dengan demikian, untuk selanjutnya, kantor DPP PK beralih menjadi Markaz Dakwah Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh anggota PK, termasuk anggota legislatifnya otomatis menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD

Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Partai Keadilan Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, Partai Keadilan Sejahtera bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2024 mendatang.

4.2 Lambang dan Arti Partai Keadilan Sejahtera

Gambar dua bulan sabit simetris menggapit padi tegak lurus ditengah berwarna emas dibawah tertulis “SEJAHTERA” berwarna kuning emas berada dalam perisai segi empat sama sisi berwarna hitam. Terdapat perisai persegi empat panjang berwarna hitam bertuliskan “PARTAI KEADILAN” dengan warna kuning emas. Kedua perisai persegi tersebut melambangkan Ka’bah, yang berada diatas dasar putih.

4.3 Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT, dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezhaliman
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.

4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.

4.4 Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera

Sejahtera Visi Umum:

"SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK Keadilan dan KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT dan BANGSA"

Visi Khusus :

“PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.“

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI :

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.

3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

PKS telah mengadakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi politik. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup lokakarya, seminar, diskusi publik, kampanye sosial, dan pelatihan kepemimpinan untuk mengajak masyarakat terlibat secara aktif dalam proses politik.

Upaya membangun kesadaran kritis, PKS juga mendorong anggota dan simpatisannya untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Selain itu, PKS juga memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan materi pendidikan politik kepada masyarakat luas.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat penelitian berikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Politik:

Penekanan harus diberikan pada pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, kebijakan publik, dan isu-isu politik terkini. Selain itu, partai harus membantu anggota dan simpatisan untuk mengembangkan keterampilan analitis, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif.

2. Memfasilitasi Diskusi Terbuka:

Partai politik perlu menciptakan ruang untuk diskusi terbuka dan dialog yang inklusif. Diskusi harus mendorong beragam pandangan politik dan memfasilitasi perdebatan yang sehat. Dengan cara ini, kesadaran kritis dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif politik.

3. Keterlibatan Partai dalam Pemberdayaan Masyarakat:

Partai politik, termasuk PKS, harus berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial yang mendukung kemajuan masyarakat secara holistik. Pengembangan usaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan publik, akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

4. Partai Politik Melakukan Rekrutmen Secara Reguler

Rekrutmen yang teratur memungkinkan partai untuk memperbaharui diri dengan membawa anggota baru yang membawa gagasan segar dan energi. Ini juga membantu menjaga keberlanjutan partai, menghindari stagnasi, serta menciptakan keberagaman dalam pandangan dan pengalaman yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqqie , Jimly. (2005). Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara. Jakarta : Konstitusi Press.
- Budiardjo, Miriam. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidz, Masykurudin, dkk. (2017). Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Jakarta: Bawaslu.
- Handoyo & Iestari. (2009). Pendidikan politik. Yogyakarta:Pohon Cahaya.
- Kartono, Kartini. (1989). Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta: Mandar Maju.
- Kusnanto, H., & Setyanto, A. (2020). Pendidikan Politik di Indonesia: Tantangan dan Prospek. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Labolo, Muhadam. 2015. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, dkk. (2021). Teknik Sampling dan Survei: Dasar Teori dan Aplikasi. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Prasojo, E. (2019). Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan di Indonesia: Sebuah Analisis Historis. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara .

Rusadi, K. (2004). Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi. Sinar Baru Algensindo.

Sahid, Komarudin. (2011). Pengantar Sosial Politik. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Baca, 1, 117.

Ariestino, L., & Kusriyah, S. (2017). Masyarakat Dalam Proses Pemilu Di Kota Semarang. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(3), 625–636.

Haryanto, B. (2017). Peran Media Massa dalam Pendidikan Politik di Indonesia. Jurnal Komunikasi Politik, 5(1), 45-60.

Kessek, M. M. (2019). Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat. Jurnal Politico, 6(2), 1–18.

Kurniawan, A., & Susanto, R. (2016). Dampak Program Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Politik Masyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik, 22(3), 289-306.

Lestari, Rinda Puji Lestari & Siti Qomariyah (2019). Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. Jurnal Hukum Tata Negara, 6(2), 1-18.

Ma'sum, M. (2016). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Model Pendidikan Politik (Studi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lamongan). Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume, 02(04), 859-873.

- Mansur, M. (2018). Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik*, 15(2), 123-140.
- Masriyani, M., & Yanti, H. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 97.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51.
- Purba, D. (2017). PRILAKU NON VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 (Studi Di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur). 1(1).
- Sukardi, D. (2015). Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik*, 12(1), 27-42.
- Suyanto, B. (2014). Pendidikan Politik di Sekolah: Sebuah Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 87-104.
- Tantya, R. A. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 1-25.
- Tarsidi, D. Z. (2018). Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik? *Jurnal Pendidikan*. 2(1), 2580–0086.
- Wijaya, A., & Hartono, H. (2013). Peran Pendidikan Politik dalam Membentuk Pemilih yang Sadar Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Demokrasi*, 10(2), 123-138

Skripsi

- Nugraheni, Dian. (2017). Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Kota Tegal. *SKRIPSI*. Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia.

Nurdin, Putri Handayani. (2016). “Implementasi kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di kabupaten bone bolang”. Skripsi. Gorontalo: universitas negeri gorontalo.

Sandika, Afen. (2018). Peran PDI perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017. SKRIPSI. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Susila, G. T. (2012). Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai demokrat di daerah pemilihan iv kabupaten temanggung. skripsi. Yogyakarta: universitas islam indonesia.

Utami, Ika Setiana Budi. (2019). Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Di Tinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang). SKRIPSI. Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Internet

KPU Provinsi Lampung. (2019). Putusan. KPU Provinsi Lampung.
<https://Lampung.kpu.go.id/> (**Diakses 30 Agustus 2023**)

KPU Kota Bandar Lampung. (2019). Putusan. KPU Kota Bandar Lampung.
<https://kota-bandarlampung.kpu.go.id/> (**Diakses 30 Agustus 2023**)